



Monitoring dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Sentra Wisata Kuliner (SWK) oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Surabaya (BPSDA) : Studi Magang di BPSDA Kota Surabaya

Dega Setiyo Hermawan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

*Email Korespondensi: degasmapas@gmail.com

Diterima: 16-12-2025 | Disetujui: 26-12-2025 | Diterbitkan: 28-12-2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the strategic role of the Surabaya City Economic and Natural Resources Division (BPSDA) in monitoring and supervising micro-economic activities taking place in the Culinary Tourism Center (SWK). SWK, as a local economic space, plays a crucial role in empowering MSMEs and managing the efficient use of natural resources. This study used qualitative descriptive methods through field observations, interviews, and documentation studies. The results indicate that BPSDA monitoring activities have improved business compliance with legality and hygiene standards, and encouraged the efficient use of resources such as air and energy. However, challenges remain, including low digital literacy and environmental awareness among MSMEs. Therefore, this study recommends strengthening the integrated digital monitoring system, ongoing training, and the involvement of the community and strategic partners such as NGOs and academics in supporting the SWK program in Surabaya.

Keywords: BPSDA, SWK, Microeconomics

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA) Kota Surabaya dalam melakukan monitoring dan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi mikro kecil yang berlangsung di Sentra Wisata Kuliner (SWK). SWK sebagai ruang ekonomi lokal memiliki fungsi penting dalam memberdayakan pelaku UMKM serta mengelola pemanfaatan sumber daya alam secara efisien. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi lapangan, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan monitoring BPSDA telah meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap legalitas dan standar kebersihan, serta mendorong efisiensi penggunaan sumber daya seperti air dan energi. Namun, masih terdapat tantangan berupa rendahnya literasi digital dan pemahaman lingkungan di kalangan pelaku UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem monitoring digital terpadu, pelatihan berkelanjutan, serta keterlibatan masyarakat dan mitra strategis seperti LSM dan akademisi dalam mendukung keberlanjutan program SWK di Surabaya.

Kata kunci: BPSDA, SWK, Ekonomi mikro

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Dega Setiyo Hermawan. (2025). Monitoring dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Sentra Wisata Kuliner (SWK) oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Surabaya (BPSDA) : Studi Magang di BPSDA Kota Surabaya. Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 1(4), 3515-3520. <https://doi.org/10.63822/rdhc4n87>

PENDAHULUAN

Kota Surabaya, sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi terbesar di Jawa Timur, terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung dan mengembangkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian rakyat. Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut adalah pengembangan Sentra Wisata Kuliner (SWK), yang tersebar di berbagai titik strategis kota. SWK tidak hanya berfungsi sebagai tempat berjualan makanan dan minuman, tetapi juga menjadi wadah strategis bagi pelaku UMK untuk tumbuh dalam ekosistem yang terkelola dengan baik. Kehadiran SWK menjadi simbol integrasi antara penguatan ekonomi mikro dengan praktik pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, mengingat setiap kegiatan usaha di dalamnya berkaitan langsung dengan penggunaan sumber daya alam, seperti air, energi, dan pengelolaan limbah.

Dalam konteks ini, peran Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA) Kota Surabaya sangat sentral, yakni sebagai lembaga yang bertugas mengatur, mengawasi, dan memfasilitasi kegiatan ekonomi di SWK agar sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Monitoring dan pengawasan terhadap aktivitas di SWK menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap pelaku usaha tidak hanya mematuhi aspek legalitas usaha, tetapi juga menerapkan praktik efisiensi dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan demikian, penguatan fungsi pengawasan oleh BPSDA tidak hanya berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi warga, tetapi juga pada terwujudnya SWK yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

KAJIAN TEORI

Teori Ekonomi Mikro Kecil

Ekonomi mikro kecil memegang peranan yang sangat penting dalam struktur perekonomian Indonesia, di mana kontribusinya didominasi oleh keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta berperan signifikan dalam pemerataan pendapatan masyarakat. Dalam konteks ini, sektor informal seperti usaha kuliner rakyat menjadi salah satu wujud nyata dari ekonomi mikro kecil yang berkembang secara dinamis di berbagai daerah, termasuk di perkotaan seperti Surabaya. Pelaku usaha pada sektor ini umumnya berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah yang mengandalkan kegiatan jual beli makanan dan minuman sebagai sumber utama penghasilan.

Selain memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, sektor ini juga menciptakan rantai ekonomi lokal yang melibatkan produsen bahan baku, jasa distribusi, hingga konsumen harian. Oleh karena itu, penguatan ekonomi mikro kecil tidak hanya penting untuk pembangunan ekonomi makro, tetapi juga menjadi kunci dalam mendorong ketahanan ekonomi komunitas serta pemerataan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Sentra Wisata Kuliner (SWK) merupakan salah satu bentuk intervensi strategis dari pemerintah daerah dalam mendukung pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) khususnya di sektor kuliner. SWK hadir sebagai ruang terfasilitasi yang tidak hanya menyediakan tempat usaha yang layak dan terstandarisasi, tetapi juga menjadi wadah promosi produk-produk makanan dan minuman khas daerah. Keberadaan SWK bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk lokal di tengah persaingan pasar yang semakin ketat, sekaligus memperluas akses pasar bagi

pelaku usaha kecil. Selain itu, SWK berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar, terutama bagi kelompok rentan ekonomi, serta mendorong pengembangan ekonomi berbasis komunitas. Dalam konteks yang lebih luas, SWK juga mendukung sektor pariwisata kota dengan menghadirkan destinasi kuliner yang higienis, menarik, dan beridentitas lokal, sehingga mampu menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara. Melalui sinergi antara pemberdayaan ekonomi rakyat dan penguatan sektor pariwisata, SWK menjadi salah satu instrumen nyata dalam pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Monitoring dan Evaluasi Program Publik

Monitoring dan evaluasi merupakan dua komponen penting dalam manajemen program publik yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dan kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. monitoring adalah aktivitas sistematis dan berkelanjutan yang digunakan untuk mengamati serta mendokumentasikan kemajuan pelaksanaan suatu program. Proses ini tidak hanya mencatat capaian, tetapi juga berperan sebagai mekanisme kontrol yang memungkinkan adanya koreksi dini apabila ditemukan penyimpangan dari rencana awal. Monitoring yang efektif memungkinkan pengambil kebijakan untuk merespons secara cepat terhadap masalah di lapangan, mengalokasikan ulang sumber daya, serta meningkatkan efisiensi program. Sementara itu, evaluasi dilakukan pada tahap tertentu, baik selama maupun setelah program berlangsung, untuk menilai sejauh mana program telah mencapai hasil yang diharapkan dan dampaknya terhadap sasaran yang dituju.

Dalam konteks pemerintahan daerah, termasuk dalam pengelolaan Sentra Wisata Kuliner (SWK), monitoring dan evaluasi tidak hanya menjadi alat pengawasan administratif, tetapi juga bagian dari proses pembelajaran kelembagaan yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya monitoring dan evaluasi yang terstruktur, instansi seperti Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA) dapat mengidentifikasi tantangan, memperbaiki strategi implementasi, serta mengembangkan pendekatan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai aktivitas monitoring dan pengawasan yang dilakukan oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA) Kota Surabaya terhadap pelaku usaha mikro kecil di Sentra Wisata Kuliner (SWK). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap proses, interaksi sosial, serta hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pengawasan dan pembinaan UMKM di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara partisipatif dengan mengamati kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh petugas BPSDA, serta aktivitas harian pelaku usaha di beberapa SWK yang menjadi lokasi penelitian. Kegiatan observasi ini bertujuan untuk memahami kondisi riil di lapangan, interaksi antara petugas dan pelaku usaha, serta kendala yang muncul selama proses pengawasan berlangsung.

Selain itu, wawancara mendalam dilakukan kepada sejumlah staf BPSDA Kota Surabaya yang terlibat langsung dalam program pembinaan dan pengawasan SWK, serta kepada beberapa pelaku usaha yang beroperasi di SWK. Wawancara ini dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, strategi pengawasan, efektivitas program, serta persepsi pelaku usaha terhadap peran pemerintah. Teknik selanjutnya adalah studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan dan pengelolaan SWK, seperti laporan evaluasi, pedoman operasional lapangan, daftar pelaku usaha, dan materi sosialisasi atau pelatihan. Data dokumenter ini digunakan sebagai bahan pembanding dan pendukung hasil observasi dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran BPSDA dalam Monitoring SWK

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA) Kota Surabaya memiliki peran penting dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan aktivitas ekonomi di Sentra Wisata Kuliner (SWK) melalui kegiatan monitoring yang dilakukan secara rutin. Monitoring ini dilakukan setiap bulan dan mencakup berbagai indikator penting, antara lain kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan, standar sanitasi dan kebersihan tempat usaha, serta efisiensi dalam penggunaan sumber daya seperti air bersih dan energi listrik. Kepatuhan terhadap izin usaha menjadi perhatian utama karena berkaitan langsung dengan legalitas dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha itu sendiri, serta keteraturan dalam pengelolaan kawasan SWK. Selain itu, aspek sanitasi menjadi krusial untuk menjaga kualitas makanan yang disajikan dan kesehatan konsumen, sementara efisiensi penggunaan air dan listrik berkaitan erat dengan prinsip pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, BPSDA melakukan monitoring melalui dua pendekatan utama, yaitu kunjungan lapangan secara langsung ke masing-masing SWK dan analisis terhadap laporan berkala yang dikirimkan oleh koordinator SWK di setiap lokasi. Kunjungan langsung memungkinkan tim BPSDA untuk melihat kondisi nyata di lapangan dan berdialog dengan pelaku usaha, sementara laporan tertulis memberikan data kuantitatif dan dokumentasi administratif sebagai bahan evaluasi. Sinergi kedua metode ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengawasan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif, sehingga potensi permasalahan dapat diidentifikasi lebih awal dan diselesaikan secara efektif.

Integrasi Pengelolaan SDA

Dalam upaya menciptakan lingkungan usaha yang berkelanjutan, Sentra Wisata Kuliner (SWK) di Kota Surabaya diarahkan untuk menerapkan prinsip efisiensi dalam penggunaan sumber daya alam. Salah satu strategi yang dilakukan adalah penyediaan fasilitas tempat sampah terpilah di setiap lokasi SWK, guna mendorong kesadaran pelaku usaha dan pengunjung terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang benar sejak dari sumbernya. Selain itu, pengelolaan limbah minyak jelantah juga mulai diterapkan, mengingat minyak bekas yang dibuang sembarangan dapat mencemari tanah dan saluran air. Pelaku usaha diajak untuk menyalurkan minyak jelantah ke pihak-pihak pengelola daur ulang yang telah bekerja sama dengan pemerintah kota.

Di sisi lain, penggunaan air bersih juga diatur agar dilakukan secara hemat dan efisien melalui edukasi dan pemantauan berkala. Semua upaya ini tidak hanya mencerminkan kepedulian terhadap

kelestarian lingkungan, tetapi juga membawa dampak nyata dalam mengurangi timbunan limbah organik, mengurangi pencemaran lingkungan, serta meningkatkan kualitas kebersihan dan kenyamanan kawasan SWK secara keseluruhan. Dengan pendekatan ini, integrasi antara kegiatan ekonomi dan pelestarian sumber daya alam menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi mikro yang berorientasi jangka panjang.

Tantangan dan Solusi

salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat literasi pelaku usaha, terutama terkait pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan teknologi digital. Banyak pelaku UMKM di SWK masih belum memahami pentingnya praktik usaha yang ramah lingkungan, seperti pengelolaan limbah secara benar, penggunaan air dan energi secara efisien, serta penerapan standar kebersihan yang memadai. Selain itu, keterbatasan kemampuan dalam menggunakan perangkat digital menjadi hambatan tersendiri dalam proses pelaporan dan pemantauan yang dilakukan secara daring. Menanggapi persoalan tersebut, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA) Kota Surabaya mengambil langkah proaktif dengan mengadakan pelatihan dan pendampingan berbasis komunitas.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan pelaku usaha dalam mengelola usaha secara berkelanjutan sekaligus memperkenalkan mereka pada sistem pelaporan digital yang lebih efisien dan akuntabel. Melalui pendekatan partisipatif, BPSDA juga menggandeng tokoh masyarakat dan koordinator SWK sebagai mitra lokal dalam proses edukasi dan pengawasan, sehingga transformasi digital dan lingkungan ini dapat berlangsung secara bertahap dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dalam studi ini, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA) Kota Surabaya memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keteraturan dan keberlanjutan aktivitas di Sentra Wisata Kuliner (SWK). Melalui mekanisme monitoring dan pengawasan yang dilakukan secara rutin dan menyeluruh, BPSDA mampu mendorong pelaku usaha untuk lebih tertib dalam hal legalitas, kebersihan, dan efisiensi penggunaan sumber daya. Hal ini menjadi bukti bahwa pendekatan pengawasan yang adaptif dan berbasis lapangan mampu memperkuat tata kelola sektor ekonomi mikro yang sebelumnya sering dianggap informal dan sulit dikendalikan.

Di sisi lain, tantangan yang muncul, khususnya terkait rendahnya pemahaman pelaku usaha tentang pengelolaan lingkungan dan teknologi informasi, menunjukkan bahwa intervensi teknis saja tidak cukup tanpa adanya proses pendampingan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan monitoring SWK bukan hanya ditentukan oleh sistem administratif yang ada, tetapi juga oleh sejauh mana peran edukatif dan partisipatif dapat dijalankan dalam membangun kesadaran kolektif. Dengan kombinasi pendekatan struktural dan sosial tersebut, SWK di Surabaya berpotensi menjadi model pengembangan ekonomi mikro yang tidak hanya kompetitif secara ekonomi, tetapi juga selaras dengan prinsip keberlanjutan lingkungan.

SARAN

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Sentra Wisata Kuliner (SWK), disarankan agar Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA) Kota Surabaya mengembangkan sistem monitoring digital terpadu yang memungkinkan evaluasi kinerja secara real-time dan terintegrasi antar unit terkait. Selain itu, pelatihan yang bersifat berkelanjutan perlu diberikan kepada para pelaku usaha, khususnya mengenai manajemen usaha yang ramah lingkungan dan pemanfaatan teknologi digital. BPSDA juga perlu menjalin kemitraan yang lebih luas dengan akademisi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), guna meningkatkan kualitas evaluasi berbasis komunitas serta memperkuat pendekatan partisipatif. Di sisi lain, penguatan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menjadi langkah strategis agar kebijakan pengawasan dan pengembangan SWK dapat berjalan secara sinergis dan berkelanjutan, serta mampu menjawab tantangan pengelolaan ekonomi mikro secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Najmudin, M., & Sunyoto, D. (2025). STRATEGI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA MELALUI PENGEMBANGAN UMKM BERBASIS POTENSI LOKAL DI DESA SENDANGADI, MLATI, SLEMAN. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(11), 2311-2318.2.
- Hatry, H.P. (2006). *Performance Measurement: Getting Results*. The Urban Institute Press.
- Anggraeni, F. A. (2022). ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENINGKATAN URBANISASI DI KOTA JAKARTA DAN SURABAYA PADA TAHUN 2020-2021: 1. Untuk Mengetahui alasan mendasar Urbanisasi di Kota Jakarta dan Surabaya 2. Untuk mengetahui dampak peningkatan Urbanisasi di Kota Jakarta dan Surabaya 3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan Penarik dari Urbanisasi di Kota Jakarta dan Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2), 41-53.
<https://prosiding.stekom.ac.id/index.php/SEMNASTEKMU/article/download/192/190/514>
- Indarti, S., & Darmi, T. (2021). Analisis Pemulihan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Berbasis Komunitas. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 9(2), 303-313.
<https://media.neliti.com/media/publications/58722-ID-integrasi-ekonomi-dan-lingkungan-hidup-d.pdf>